

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0371/0/1978

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Mengabang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tanggap Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan ketentuan, dijangka perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 54 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/71 Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/81 Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1981;
 - e. Nomor 138/81 Tahun 1981;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 02276/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/1/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : a. Mendirikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri; b. memberikan 90 kuota untuk 90 Negeri; c. sebagai provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Kodudukan, tugas dan fungsi, serta organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diklasifikasi "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.

Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tercantum pada diklasifikasi "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diklasifikasi "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.

Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku untuk seluas-luasnya mulai tanggal 1 Juni 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.n.
/s/ H. H. R. H. H. H.
/s/ H. H. H. H. H.
/s/ H. H. H. H. H.